

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengungsi dalam Hukum Internasional	14
B. Tinjauan Mengenai <i>The 1951 Convention On Relating To The Status Of Refugees</i>.....	17
1. Pengantar	17
2. Latar Belakang Dibentuknya <i>The 1951 Convention Relating To The Status of Refugees</i>	18
3. Tujuan <i>The 1951 Convention Relating To The Status Of Refugees</i>	18
4. Pengaturan dalam <i>The 1951 Convention Relating To The Status Of Refugees</i>	19
C. Tinjauan Instrumen Universal Hak Asasi Manusia	20
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948	20
2. <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (ICCPR)	22
3. <i>International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights</i> (ICESCR)	25
D. Prinsip – Prinsip Dasar Hukum Pengungsi Internasional dan Nasional.....	26
1. Prinsip – Prinsip Dasar Hukum Internasional	26
2. Hukum Pengungsi Internasional di Indonesia	30
E. Solusi Permanen Pengungsi di Indonesia	33
1. Permohonan Status Pengungsi	33
2. Solusi Permanen Pengungsi	35

F. Tinjauan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri	40
G. Organisasi Internasional dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia	43
1. Tugas dan Kewajiban <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i> (UNHCR)	43
2. Tugas dan Kewajiban <i>International Organization for Migration</i> (IOM)	49
H. Rumah Detensi Imigrasi	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Sifat Penelitian	53
B. Jenis Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian	56
D. Subjek Penelitian	56
E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	57
F. Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Relevansi Antara Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dengan <i>The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees</i> dalam Mengatur Ketentuan Penampungan Pengungsi.....	61
1. Pengungsi dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia.....	61
2. Peran <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i> (UNHCR)	64
3. Ketentuan Penampungan Pengungsi yang Diatur Dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.....	67
a. Penampungan Pengungsi.....	70
b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi.....	74
c. Surat Identitas Pengungsi	79
d. Prinsip <i>Non-Refoulement</i>	80
4. Ketentuan Penampungan Pengungsi <i>The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees</i> yang Tidak Diatur Dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.....	85
a. Pendidikan Umum	87
b. Jaminan Sosial	96
c. Pekerjaan yang Menghasilkan Upah.....	99
B. Implementasi Terhadap Penampungan Pengungsi Menurut Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penampungan Pengungsi Dari Luar Negeri di Indonesia	106

1. Penampungan Pengungsi di Indonesia.....	107
a. Rumah Detensi Imigrasi.....	107
b. <i>International Organization for Migration (IOM)</i>	113
c. <i>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)</i>	120
2. Penampungan Pengungsi Penyandang Disabilitas	121
3. Fasilitas Kebutuhan Dasar Pengungsi.....	124
4. Dana Penampungan Pengungsi	125
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	133

LAMPIRAN

1. The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees
2. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri
3. IOM Indonesia Migrants Statistics Report
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi tentang Pengembalian Fungsi Rudenim Nomor IMI-UM. 01.01-2827
5. Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 tentang Surat Pernyataan Bagi Imigran Gelap yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi